

# **ANALISIS KELEMBAGAAN PENGENDALIAN HAMA TERPADU MENDUKUNG AGRIBISNIS KOPI RAKYAT DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH**

**SAPTANA, TRI PANAJI, HERLINA TARIGAN DAN ADI SETIANTO**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Bogor

## **ABSTRACT**

Integrated Pest Management Program (IPM) that is strategic operational measure. In the micro farm level, IPM operational measure can be answered both capital problem in the farm level and international commodity coercion on environmental and food safety consumption simultaneously. That paper objective to analysis : (1) historical government policy on IPM related the decentralization of development; (2) performance, constrain, and prospective IPM program in the decentralization era; (3) comparative farming performance IPM cooperators, inter success farms group and least success farms group; (4) factors that affected dissemination and adoption IPM technology; (5) synopsis on IPM sustainable institution in the decentralization era; and (6) to formulate police IPM sustainable development alternative supporting small coffee agribusiness in the decentralization era. Rates of participation of the IPM program participants varied among activities, i.e., planning, implementation, monitoring and evaluation. Low participation rate was found in planning, that of implementation was high, while that of monitoring and evaluation was low to moderate. Program explanation during the planning stage was not properly carried out. The other weaknesses were management of post harvest, processing, and marketing. After the IPM program average net benefits from coffee bean and additional in-rows plants were to increase, respectively. Economic factors positively affecting IPM technology adoption were: (1) decreasing costs of inputs (fertilizers and pesticides); (2) improving farmers' income through higher yield and better quality; (3) improving stability and continuity of farmers' income due longer harvest and productive periods, and the products were sold periodically. In the future, development of IPM program for smallholding coffee plantation is based on the clear vision, namely *IPM technology for improving rural people welfare*. This vision has to replace the old vision, namely *IPM technology is created just to show that the researchers are able to show their ability in developing technology*. Therefore, in the future IPM development has to implicate directly to improved competitive economy and rural people welfare.

*Key Words: Institutional, Integrated Pest Management, Agribusiness, Coffee, Regional Autonomy*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Pelaksanaan program pengendalian hama terpadu (*Integrated Pest Management*) merupakan langkah yang sangat strategis dalam kerangka tuntutan masyarakat dunia terhadap berbagai produk yang aman dikonsumsi, menjaga kelestarian lingkungan, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan yang memberikan manfaat antar waktu dan antar generasi. Salah satu pertimbangan dasar, pentingnya melakukan introduksi teknologi PHT, adalah adanya pergeseran strategi pembangunan dari pendekatan pertumbuhan, *top down*, dan

bersifat jangka pendek (pola pembangunan konvensional) ke arah pendekatan pembangunan pemerataan, partisipatif, jangka panjang dan berkelanjutan yang disebut pola pembangunan berkelanjutan (Salim, 1991).

Dalam bidang perkopian di Indonesia, usahatani kopi rakyat memegang peranan yang sangat penting, mengingat sebagian besar (93%) produksi Kopi di Indonesia berasal dari kopi rakyat. Namun demikian, kondisi pengelolaan usahatani pada perkebunan kopi rakyat masih relatif kurang baik dibandingkan kondisi perkebunan besar negara. Paling sedikit ada dua masalah utama yang ada pada perkebunan kopi rakyat, yaitu produktivitas hasil yang relatif rendah dan mutu hasil produksi yang kurang memenuhi syarat untuk diekspor (Santoso, 1987 a).

Permasalahan pertama sangat terkait dengan rendahnya adopsi teknologi (penggunaan klon bibit tidak unggul, pemupukan jauh lebih rendah dibandingkan rekomendasi, dan kurangnya pengendalian HPT). Sedangkan permasalahan kedua sangat terkait dengan rendahnya kualitas hasil dan lemahnya penanganan teknologi panen dan pasca panen (termasuk pengolahan, sortasi, grading, standarisasi mutu hasil, labelisasi dan kemasannya). Permasalahan di atas nampaknya dapat dipecahkan melalui pengembangan teknologi PHT.

### **Tujuan Penelitian**

1. Melakukan kaji ulang terhadap berbagai kebijakan pengembangan PHT pada komoditas perkebunan kopi rakyat relevansinya dengan kebijakan otonomi daerah
2. Mengkaji kinerja, kendala, dan prospek pelaksanaan program PHT pada perkebunan kopi rakyat di era otonomi daerah
3. Melakukan analisis komparasi keragaan usahatani peserta PHT yang relatif berhasil dan yang kurang berhasil dalam mendukung agribisnis berkelanjutan
4. Menganalisis faktor-faktor baik teknis, ekonomi, sosial-kelembagaan, serta lingkungan yang mempengaruhi efektivitas desiminasi dan adopsi teknologi PHT pada petani pekebun kopi rakyat
5. Merumuskan simpul-simpul kritis kebijakan pengembangan kelembagaan PHT secara berkelanjutan dalam kerangka otonomi daerah
6. Perumusan pilihan kebijakan pengembangan PHT secara berkelanjutan dalam mendukung pengembangan agribisnis kopi rakyat di era otonomi daerah.

## METODOLOGI PENELITIAN

### Kerangka Pemikiran

Program pembangunan pada dasarnya adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal yang sama juga terjadi dalam program pembangunan pertanian yang dilaksanakan dalam bentuk proyek PHT-Kopi Rakyat. Perlu dilakukan kaji ulang terhadap program PHT kopi rakyat mendukung agribisnis berkelanjutan di era otonomi daerah. Dalam konteks otonomi daerah berarti bahwa setiap program pembangunan harus ditinjau dari perspektif pembangunan daerah atau wilayah dan pelibatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan program.

Teknologi PHT harus dipandang sebagai salah satu komponen teknologi dari pembangunan usahatani yang merupakan bagian penting dari pembangunan agribisnis secara keseluruhan, karena jumlah dan kualitas hasil di tingkat usahatani akan menentukan daya saing produk kopi rakyat di pasar baik domestik maupun ekspor. Penting kiranya melakukan studi kinerja usahatani peserta PHT baik kondisi sebelum maupun sesudah PHT Kopi Rakyat. Menganalisis faktor-faktor baik teknis, ekonomi, sosial kelembagaan, serta lingkungan yang mempengaruhi efektivitas desiminasi dan adopsi teknologi pada petani pekebun kopi rakyat.

Berangkat dari hal yang demikian, maka strategi pembangunan pertanian diarahkan untuk peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (*human resorch capacity*), kapasitas kelembagaan (*institutions capacity*), meningkatkan penguasaan aset produktif (lahan dan modal), inovasi teknologi baru dan menata kembali kebijaksanaan pembangunan ekonomi wilayah dalam kerangka otonomi daerah, sehingga pada akhirnya dapat dihasilkan produk kopi rakyat yang berdayasaing tinggi.

### Metode Penelitian

Sebagai penelitian yang bersifat sosial ekonomi, di mana fokus penelitian ditekankan kepada analisis kelembagaan Pengendalian Hama Terpadu dalam mendukung pengembangan agribisnis dan dalam kerangka otonomi daerah, maka penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kelembagaan PHT, kinerja pengembangan agribisnis kopi rakyat yang difokuskan pada subsistem usahatani, serta bagaimana perspektif pengembangan PHT-Kopi Rakyat ke depan relevansinya dengan otonomi daerah.

Penelitian akan menggunakan pendekatan pemahaman pedesaan dalam waktu cepat atau RRA (*Rapid Rural Apraisal*) dan Survey. Penelitian akan dilakukan di Propinsi Jawa Timur dengan mengambil di dua Kabupaten contoh yaitu Malang dan Kediri. Pemilihan

lokasi kabupaten didasarkan pada tingkat kontribusi produksi kopi rakyat terhadap produksi kopi Jawa Timur dan tingkat keberhasilan pelaksanaan program PHT Kopi Rakyat. Pada kasus ini Kabupaten Malang mewakili kategori sangat berhasil dan Kabupaten Kediri pada kategori cukup berhasil. Dalam hal ini dilakukan pengkategorisasian dengan tingkat sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan kurang berhasil. Di Kabupaten Malang lokasi yang dipilih adalah Kecamatan Tirtoyudo yang merupakan lokasi dengan kategori sangat berhasil. Di Kabupaten Kediri yang dipilih adalah Kecamatan Kepung dan Kandangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif sekaligus. Sementara itu data dan informasi tentang sebaran lokasi dan responden contoh dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Distribusi Responden Contoh Menurut Kategori Responden Contoh di Lokasi Penelitian

Uraian	Kecamatan contoh Program PHT berjalan baik		Kecamatan contoh Program PHT berjalan kurang baik		Total
	PHT	Non PHT	PHT	Non PHT	
1. Petani	15	15	15	15	60
2. Kelompok Tani	2	2	2	2	8
3. Kontak Tani PHT	2	0	2	0	4
4. Pelaku ekonomi (pedagang, industri pengolahan, dll)	3		3		6
4. Pamong Desa dan Tokoh masyarakat berkaitan dengan PHT	2	0	2	0	4
5. PPL/Pengamat Hama/ KCD	3	0	3	0	6
6. Dinas Pekebunan Kabupaten dan Propinsi	2	0	2	0	4
7. Lembaga Penelitian Kopi	2	0	2	0	4
8. BPTP	2	0	2	0	4
Total Responden	33	17	33	17	100

## **KAJI ULANG TERHADAP PROGRAM PHT KOPI RAKYAT RELEVANSINYA DENGAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH**

### **Konsep PHT dan Penerapannya Pada Usahatani Kopi Rakyat**

Pengertian PHT sangat beragam, tergantung pada tingkat pemahaman seseorang tentang ekosistem budidaya tanaman yang diusahakan serta lingkungan tumbuhnya. PHT adalah cara pengelolaan pertanian yang bertujuan untuk meminimalisasi serangan OPT secara alami, sekaligus mengurangi bahaya yang ditimbulkan terhadap penggunaan bahan kimiawi (pupuk dan pestisida) terhadap manusia, tanaman dan lingkungan.

Pengendalian PHT Perkebunan Kopi Rakyat pada dasarnya menerapkan prinsip budidaya tanaman kopi secara sehat dan menjaga keseimbangan ekosistem alamnya. Salah satu aplikasi PHT adalah dengan meminimalkan penggunaan pupuk dan pestisida kimia serta memanfaatkan potensi alam disekitar kebun. Kunci keberhasilan dalam penerapan PHT

adalah pengetahuan para pengelola pertanian tentang OPT, budi daya tanaman dan interaksinya dengan faktor-faktor lingkungan. Pengetahuan tentang OPT yang dibutuhkan antara lain pengenalan gejala awal, identifikasi jenis-jenis OPT yang spesifik, siklus hidup OPT, dan bagaimana interaksinya dengan lingkungan fisik. Dari pengetahuan dasar tersebut dapat ditentukan waktu dan bentuk tindakan yang harus dilakukan. Sebagai ilustrasi petani kopi akan membiarkan tanaman kopinya kalau serangan masih dibawah 5 persen, mengendalikan dengan pestisida nabati jika serangan  $> 5 - 20$  persen dan akan dilakukan tindakan pengendalian dengan pestisida selektif apabila serangan  $> 20$  persen.

Pengetahuan tentang budi daya tanaman seperti pemupukan yang tepat, pengolahan tanah yang baik, pemilihan benih dan bibit unggul, dan teknik pemangkasan lepas panen diperlukan untuk mendapatkan tanaman tumbuh dengan optimal. PHT tidak akan berhasil tanpa program budi daya yang baik dan benar. Tanaman yang sehat akan lebih tahan terhadap serangan OPT dan lebih cepat sembuh setelah terjadi serangan hama dan penyakit. Praktik budidaya yang dilakukan di lapangan mempengaruhi keberadaan suatu penyakit atau hama tertentu dan besar kecilnya tingkat serangan. Contohnya pemberian pupuk nitrogen yang berlebihan dapat meningkatkan serangan penyakit tertentu pada tanaman kopi.

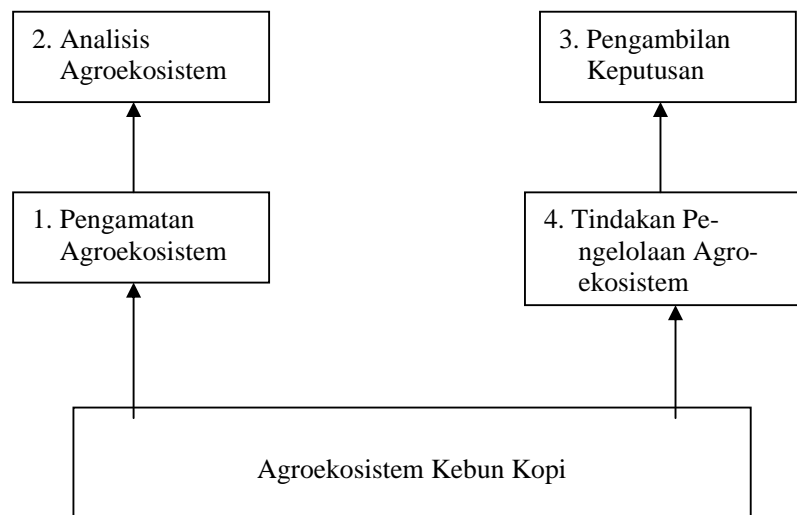
### **Evaluasi Kinerja Pelaksanaan SL-PHT dan PHT**

Program SLPHT Perkebunan Rakyat dimulai tahun 1998 yang dikelola Bagian Proyek *Integrated Pest Management* SEC yang berkedudukan di Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Program ini direncanakan berakhir pada Desember tahun 2004. Salah satu kegiatan penting dari program ini adalah melakukan pendidikan dan pelatihan, di mana kegiatan pada tahun 2001 yang meliputi: (1) Pelatihan SL-PHT Kopi Petani Murni; (2) Pelatihan SL-PHT Kopi Tindak Lanjut; dan (3) Pelatihan dan pendidikan teknis lainnya: (1) Pelatihan Petani Pemandu; (2) Pelatihan Produksi BCA petani; (3) Pelatihan Produksi BCA PBS; (4) Workshop Produksi BCA; (5) Pelatihan Pembibitan Kopi; (6) Pembibitan Kopi Arabika dan Robusta; (7) Pelatihan Monitoring dan Evaluasi; dan (8) Pelatihan Pest Monitoring.

Secara ringkas diagram alur penerapan Program PHT Kopi Rakyat adalah sebagai berikut (gambar 1): (1) Pengamatan agroekosistem, merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi terhadap beberapa sampel atau contoh tanaman kopi yang dipilih secara acak (100 pohon) yang dilakukan secara berputar dari 4 kelompok kecil yang dibentuk, hasilnya adalah data keadaan masing-masing komponen agroekosistem; (2) Analisis agroekosistem, merupakan kegiatan yang dilakukan petani biasanya dengan kelompok kecil kurang lebih 5 orang untuk membandingkan keadaan rata-rata dari komponen yang diamati dengan nilai

normalnya, hasilnya adalah petani memiliki daftar komponen agroekosistem yang mempunyai potensi bermasalah; (3) Pengambilan keputusan, berdasarkan potensi masalah yang sudah teridentifikasi, maka kegiatan petani dari berbagai kelompok kecil tadi menyusun berbagai alternatif pemecahan masalah yang dapat ditetapkan sebagai tindakan dalam pengelolaan; (4) Tindakan pengelolaan agro-ekosistem, merupakan kegiatan petani untuk melaksanakan keputusan yang telah memperhitungkan berbagai faktor baik ekonomi, ekologis dan aspek teknis, antara lain apakah dengan pemanfaatan BCA, perlakuan kultur teknik, atau dengan penggunaan pestisida nabati ataukah pestisida kimiawi.

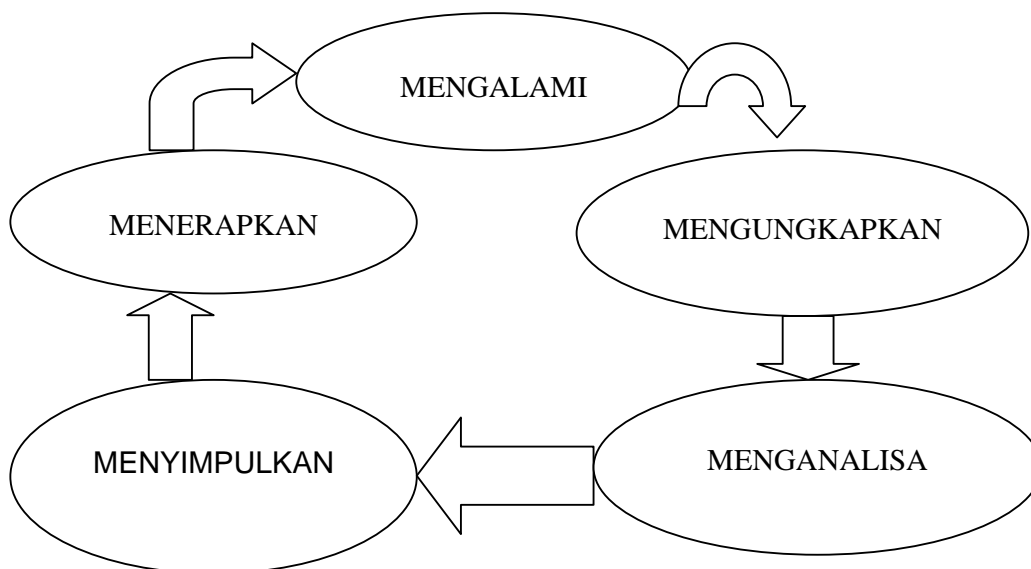
Dalam upaya memberdayakan atau memandirikan petani baik individu maupun secara kelompok agar dapat mengaplikasikan teknologi PHT pada perkebunan kopi rakyat maka dilakukan serangkaian kegiatan pendidikan dan pelatihan baik dengan materi teori, peragaan gambar, teknik bermain, maupun langsung praktek di lapang, sehingga petani baik secara individu atau kelompok dapat meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, rasa percaya diri, dan profesionalismenya melalui SL-PHT



Gambar 1. Diagram Alur Tahapan Penerapan Teknologi PHT Kopi Rakyat

SL-PHT adalah suatu bentuk pendidikan atau pelatihan PHT bagi petani yang dilaksanakan secara partisipatif dengan metodologi pendidikan orang dewasa (*andragogi*), yakni suatu metodologi pembelajaran yang senantiasa menekankan terjadinya proses belajar dari pengalaman. Pengalaman yang terstruktur adalah suatu siklus belajar yang didapat dari pengalaman yang dirancang secara sadar oleh Pemandu Lapang (PL-1 dan PL-2) agar peserta belajar dapat berpartisipasi aktif menarik pelajaran yang sedalam-dalamnya mengenai pokok bahasan yang telah dilakukannya sendiri, dalam konteks ini adalah berusaha kopi. Tahapan alur siklus belajar berdasarkan pengalaman dapat diilustrasikan sebagai berikut (gambar 2).

Untuk dapat mewujudkan prinsip-prinsip belajar seperti tersebut maka beberapa azas penting perlu dipahami dalam pelatihan PHT yang diterapkan melalui SL-PHT Perkebunan Kopi Rakyat: (1) Bahwa sarana belajar utama adalah kebun kopi; (2) Belajar dari pengalaman di kebunnya sendiri untuk dapat mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di lapangan; (3) Analisis agroekosistem untuk melakukan pengambilan keputusan tentang tindakan-tindakan yang harus diambil dalam pengelolaan kebun kopi; dan (4) Menggunakan metode dan bahan yang sederhana, praktis dan bersifat tepat guna.



Gambar 2. Siklus Belajar dari Pengalaman yang Dilakukan Sendiri

Beberapa permasalahan pokok dalam pelaksanaan program SL-PHT Kopi Rakyat, antara lain adalah: (1) Dalam Kelompok Petani Murni terdapat permasalahan gender, pelibatan wanita tani masih sangat kurang ; (2) Penentuan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) dalam kelompok tani calon peserta SL-PHT masih belum menerapkan prinsip-prinsip selektifitas yang mantap; (3) Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah di tingkat kabupaten telah mempengaruhi struktur kelembagaan SL-PHT Kopi yang dibangun, seperti terjadinya jabatan rangkap Ketua Panitia Pelaksana SL-PHT dan PL-2 dengan jabatan struktural menjadi masalah tersendiri; dan (4) Fluktuasi harga jual kopi yang tajam sangat mempengaruhi kinerja petani dalam menerapkan teknologi PHT Kop; (5) Struktur pasar kopi yang dihadapi petani bersifat oligopsonistik, dengan pilihan dan tujuan pasar terbatas; (6) Belum adanya kelompok tani yang melakukan pendalaman produksi kopi dari ose kering menjadi produk jadi, karena kegiatan pengolahan memerlukan modal besar serta pengetahuan yang memadai; dan (7)

Keterbatasan modal usaha baik untuk kegiatan *on farm* maupun *of farm*; (8) Jumlah pohon yang dapat dijadikan sebagai pestisida nabati terbatas; serta (9) Pemilikan ternak terbatas, khususnya dalam menghasilkan pupuk kandang sebagai bahan pembuatan bokhasi.

### **Perspektif PHT Kedepan: Dari Kuantitas Menuju Kualitas**

Hingga saat ini ukuran atau target keberhasilan dari proyek PHT diukur dari kuantitas atau jumlah petani dan kelompok tani yang dilatih, jumlah PL-2 yang berhasil dilatih atau petandu yang berhasil dilatih. Hasil pengamatan dari Malang maupun Kediri menunjukkan bahwa apabila indikator keberhasilan proyek masih hal itu, maka “warna” dari program dan proyek PHT adalah pemerataan. Dalam arti lain proyek PHT dilaksanakan merata untuk seluruh wilayah perkebunan kopi, tanpa melihat sejauh mana kualitas hasil dan tingkat keberhasilan penerapan. Diperkirakan dimasa yang akan datang kemampuan bersaing kopi Indonesia tetap rendah.

Indikasi di lapangan menunjukkan bahwa program PHT memerlukan pendekatan kewilayahan dan memerlukan penerapan seluruh subsistem dalam sistem agribisnis secara utuh. Pihak dinas perkebunan menangkap gejala ini dengan ditingkatkannya SLPHT menjadi SL Agribisnis. Hal yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah sebenarnya itu yang dibutuhkan? Setelah dipandang bahwa PHT sebagai komponen teknologi yang akhirnya dilanjutkan dengan SL Agribisnis? Apabila kita sepakat mengkaji lebih mendalam program PHT dalam konteks prospeknya pada masa yang akan datang dihadapkan pada desakan kebutuhan petani dan pengembangan ekonomi pedesaan. Hal itu ada benarnya, namun akan lebih benar apabila kita berpikir tentang terjadinya fenomena *lost generation* dari petani kopi. Kenapa demikian? **Pertama**, peserta SLPHT adalah petani yang telah berumur; **Kedua**, para anak petani kopi yang notabene memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi tidak lagi tertarik berusahatani kopi; **Ketiga**, harga kopi cenderung menurun padahal tingkat kompetisi makin tinggi; **Keempat**, seluruh komponen ekonomi pedesaan tidak digerakkan secara bersama-sama dengan program PHT Kopi; **Kelima**, penerapan PHT membutuhkan daya fikir, daya nalar, daya kreasi dan daya juang lebih tinggi, dalam hal ini penerapan PHT membutuhkan petani yang memiliki wawasan sarjana atau minimal wawasan diploma; **Keenam**, potensi sumberdaya manusia yang telah dimiliki baik hasil penerapan SLPHT tanaman pangan maupun hasil penerapan PHT cukup banyak. Hal ini berarti bahwa pendekatan harus diubah untuk menyiapkan pendidikan tinggi bagi petani-petani kopi agar tidak terjadi *lost generation*.

Dalam rangka merubah pola pentargetan kuantitas menjadi kualitas, mengingat PHT tetap diperlukan pada masa yang akan datang, dipertimbangkan akan lebih baik jika didirikan



sebuah lembaga pendidikan agribisnis yang di dalamnya melatih seluruh generasi muda untuk menjadi petani-petani kopi handal pada masa yang akan datang. Pendidikan dapat dimulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, yang mana formulasi awal harus mempertimbangkan tenaga terdidik nantinya memiliki profesi sebagai petani. Peserta pendidikan sedapat mungkin adalah anak-anak petani kopi dan diarahkan untuk nantinya menjadi petani kopi pada masa yang akan datang.

## **KINERJA, KENDALA DAN PROSPEK PELAKSANAAN PHT KOPI RAKYAT DI ERA OTONOMI DAERAH**

### **Tingkat Partisipasi Pada Berbagai Tahapan Kegiatan**

Tingkat partisipasi petani peserta program PHT-Kopi Rakyat pada berbagai tahapan kegiatan, dari tahap perencanaan, implementasi, hingga tahap monitoring dan evaluasi menunjukkan tingkat partisipasi beberapa variasi. Tingkat partisipasi pada tahap perencanaan umumnya masih lemah, pada tahap pelaksanaan cukup tinggi, sedang pada tahap monitoring dan evaluasi masih lemah hingga sedang. Beberapa kelemahan yang masih ditemukan pada tahap perencanaan terutama pada aspek sosialisasi program yang dipandang kurang melalui proses sosial yang matang. Sementara itu, pada tahap implementasi serta monitoring dan evaluasi masih ditemukan kelemahan pada penerapan monev tentang masalah penanganan pasca panen, pengolahan hasil, serta aspek pemasaran hasil.

### **Kinerja Kepemimpinan, Pelaksana, dan Peserta**

Persepsi terhadap kinerja kepemimpinan kelembagaan PHT kopi rakyat di Malang dan Kediri diamati berdasarkan beberapa unsur yang mencakup kecerdasan, visi, keteladanan, rasionalitas, komunikatif dan demokratis dinilai bagus. Petani responden mempersepsikan kinerja kompetensi SDM pelaksana PHT di lapangan sangat positif dan menilai kompetensi SDM pelaksana yang baik. Petani juga memberi persepsi yang khusus terhadap diri mereka sebagai peserta program, yang menunjukkan bahwa sebagian besar petani mempersepsikan peserta program PHT sudah baik jika dilihat ketrampilan bertani, pengalaman bertani, kematangan emosional, kegigihan bekerja maupun apresiatif terhadap tatanilai maupun organisasi.

### **Persepsi Terhadap Kinerja Kegiatan dan Penerapan PHT-Kopi Rakyat**

Secara umum persepsi petani peserta baik di Malang dan Kediri terhadap kinerja kegiatan dan penerapan PHT-Kopi Rakyat, mulai dari penyeleksian peserta SLPHT, perencanaan belajarnya, hingga pelaksanaan proses belajarnya dinilai baik. Dari aspek tingkat penerapan dalam implementasi program PHT-Kopi Rakyat, terdapat kisaran persepsi yang cukup menyebar. Beberapa topik kajian SLPHT dinilai sangat baik dan disampaikan dengan sangat baik pula, tetapi petani mengalami beberapa kesulitan dalam penggunaannya di dunia pertanian.

### **Persepsi Terhadap Manfaat Pelatihan**

Petani menilai manfaat yang dirasakan setelah mengikuti pelatihan pengendalian hama terpadu lewat proyek PHT-Kopi Rakyat sangat berguna. Petani juga banyak memperoleh informasi yang berkaitan dengan perkopian dalam bentuk seminar, lokakarya, konperensi atau anjangsana ke perkebunan kopi di daerah lain. Namun demikian bentuk pelatihan dan anjangsana dinilai jauh lebih memberi manfaat karena selain mendengar mereka juga ikut praktek atau pengamatan tanaman secara langsung.

Keingintahuan petani dapat dilihat dari berkenannya mereka menghadiri sejenis pelatihan yang terkait dengan berbagai aspek usaha yang bisa mereka lakukan. Dari beragam aspek pelatihan yang ditawarkan, pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran mendapat respon yang paling besar. Hal ini karena dalam SLPHT dianggap belum banyak dibahas sementara persoalannya cukup penting. Sekalipun aspek budi daya dan PHT masih cukup diminati tetapi petani merasa SLPHT belum banyak memberi penekanan pada ketiga aspek di atas.

### **Persepsi Terhadap Bantuan Teknis dan Penguatan Kelembagaan**

Menyoroti kegiatan SLPHT yang sudah dilaksanakan 2-3 tahun lalu, ada beragam persepsi yang berkembang di kalangan para peserta. Persepsi dalam konteks ini lebih mendekati pengertian penilaian yang dilakukan oleh petani sebagai peserta terhadap proses pelaksanaan SLPHT. Persepsi yang dibahas kemudian ini terkait dengan bentuk bantuan teknis yang disediakan oleh program, performa bantuan teknis tersebut dan bantuan penguatan kelembagaan proyek itu sendiri. Responden menilai praktek usahatani PHT yang dilaksanakan selama pelatihan sangat memuaskan untuk kasus Malang dan memuaskan untuk kasus Kediri.

Dilihat dari segi performa bantuan penguatan kelembagaan yang berlangsung pada proyek PHT-Kopi Rakyat rata-rata dipersepsikan bagus. Sosialisasi program dinilai antara

bagus dan sangat bagus. Ini mengindikasikan segala persiapan (kelompok, materi, metoda maupun pelatih) tidak diadakan secara tergesa-gesa sehingga peserta tahu benar apa yang akan mereka kerjakan dan apa tujuannya. Selain sosialisasi program, bantuan penguatan lainnya seperti penyusunan tupoksi, pembagian peran dan tupoksi serta pembinaan manajemen kelompok yang baik.

Performa bantuan teknis yang diberikan oleh proyek PHT-Kopi Rakyat dalam membangkitkan kelompok baik di desa contoh Malang maupun Kediri dinilai mampu membangkitkan kemampuan peserta untuk mengemukakan pendapat secara bagus, karena metoda mengajar dan materi yang diajarkan berdekatan langsung dengan aktifitas maupun kehidupan serta kemampuan petani. Pembahasan mengenai dunia yang digeluti petani sebagai petani kopi mendorongnya peduli dan aktif dalam proses belajar-mengajar yang dilaksanakan. Momentum ini sekaligus menambah kecintaan dan rasa tanggungjawab terhadap kebunnya.

### **Persepsi Terhadap Dampak dan Manfaat Program**

Persepsi petani peserta Program PHT-Kopi Rakyat tentang dampak program menunjukkan bahwa Program PHT-Kopi Rakyat telah berdampak positif terhadap kemampuan petani peserta program dalam praktek kegiatan PHT-Kopi Rakyat, karena banyak materi pelatihan yang diberikan dengan berbagai praktek di lapangan.

Program PHT-Kopi Rakyat telah memberikan manfaat positif terhadap peningkatan produktivitas dan tingkat keuntungan yang diterima petani, meskipun penerapan PHT-Kopi Rakyat telah berdampak pada peningkatan biaya produksi persatuan luas lahan (per ha), namun telah menurunkan biaya produksi persatuan output kopi atau (per kg kopi).

## **STRUKTUR PENGUASAAN LAHAN DAN ANALISIS USAHATANI PHT KOPI RAKYAT**

### **Struktur Penguasaan Lahan**

Rata-rata luas pemilikan lahan di pedesaan Kabupaten Malang ber-variasi antar jenis lahan. Sebagai ilustrasi rata-rata luas pemilikan lahan sawah hanya seluas 0,01 ha, lahan tegalan 0,11 ha, lahan yang merupakan kebun kopi seluas 0,85 ha, dan lahan pekarangan yang hanya seluas 0,05 ha. Sementara itu lahan garapan petani kopi sedikit lebih luas. Rata-rata luas garapan lahan sawah 0,01 ha, lahan tegalan 0,16 ha, lahan kebun kopi seluas 0,89 ha, serta lahan pekarangan seluas 0,05 ha. Secara kumulatif luas total lahan garapan mencapai 1,11 ha (Tabel .2).

Tabel 2. Penguasaan Lahan Milik dan Lahan Garapan oleh Petani Kopi Rakyat, di Kabupaten Malang, Jawa Timur, 2003

Uraian	Milik (Ha)	Sewa (Ha)	Sakap (Ha)	Gadai (Ha)	Pinjam (Ha)	Total (Ha)
1. Sawah	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2. Tegalan	0,11	0,05	0,00	0,00	0,00	0,16
3. Kebun kopi	0,85	0,04	0,00	0,00	0,00	0,89
4. Pekarangan	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
Jumlah	1,02	0,09	0,00	0,00	0,00	1,11

Rata-rata luas pemilikan lahan di pedesaan Kabupaten Kediri ber-variasi antar jenis lahan. Sebagai ilustrasi rata-rata luas pemilikan lahan sawah hanya seluas 0,01 ha, lahan tegalan 0,11 ha, lahan yang merupakan kebun kopi seluas 0,75 ha, dan lahan pekarangan yang hanya seluas 0,08 ha. Secara kumulatif rata-rata luas pemilikan total lahan seluas 0,96 ha. Sementara itu, rata-rata luas garapan petani kopi adalah: lahan sawah 0,01 ha, lahan tegalan 0,16 ha, lahan kebun kopi seluas 0,86 ha, serta lahan pekarangan seluas 0,08 ha. Secara kumulatif luas total lahan garapan mencapai 1,18 ha (Tabel 3).

Tabel 3. Penguasaan Lahan Milik dan Lahan Garapan oleh Petani Kopi Rakyat di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 2003

Uraian	Milik (ha)	Sewa (ha)	Sakap (ha)	Gadai (ha)	Pinjam (ha)	Total (ha)
1. Sawah	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2. Tegalan	0,11	0,00	0,05	0,00	0,00	0,16
3. Kebun kopi	0,75	0,02	0,10	0,00	0,00	0,86
4. Kebun lain	0,01	0,00	0,03	0,00	0,02	0,05
5. pekarangan	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
6. Kolam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,96	0,02	0,18	0,00	0,02	1,18

Masalah penguasaan lahan pertanian khususnya kebun kopi di pedesaan Kabupaten Malang dan Kediri rata-rata semakin sempit. Meskipun dari hasil wawancara diperoleh rata-rata pemilikan lahan kebun sekitar 0,85 ha di Malang dan 0,75 ha di Kediri, namun berdasarkan informasi kualitatif di lapang rata-rata di tingkat desa serta memperhitungkan petani lahan sempit dan anggota masyarakat yang tidak berlahan maka diperkirakan rata-rata pemilikan lahan kebun kopi di pedesaan Malang hanya seluas 0,25 - 0.50 ha. Gejala kelangkaan lahan milik dan garapan sangat terasa di lapang dan ini terbukti bahwa hampir sebagian besar petani melakukan perambahan terhadap perkebunan swasta terdekat yang di anggap terlantar serta terhadap hutan yang selama ini dikelola Perhutani.

### **Analisis Usahatani PHT Kopi Rakyat**

Berdasarkan analisis biaya dan penerimaan usahatani menunjukkan bahwa meskipun dengan adanya Program PHT telah meningkatkan biaya total usahatani, di mana di desa contoh Malang meningkat dari Rp 3,31 juta/ha/ tahun menjadi Rp.4,50 juta/ha/tahun dan untuk desa contoh Kediri biaya produksi meningkat dari sebesar Rp. 3,63 juta/ha menjadi Rp 4,73 juta/ha, namun ternyata bahwa Program PHT-kopi rakyat masih mampu memberikan tingkat penerimaan yang lebih besar untuk desa contoh Malang meningkat dari Rp 10,05 juta/ha/tahun menjadi Rp 12,22 juta/ha/tahun, demikian juga untuk desa contoh Kediri meningkat dari Rp. 6,69 juta menjadi Rp. Rp 9,01 juta/ha. Hal ini mampu meningkatkan keuntungan yang diterima petani. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan satu-satuan tambahan masukan atau input memberikan peningkatan nilai tambah lebih besar dari satu-satuan. Secara umum petani masih menghadapi *increasing return to scale*, dengan rata-rata umur tanaman kopi adalah umur produktif (8 - 10 tahun).

Hasil analisis efisiensi penggunaan modal dengan analisis R/C ratio memberikan hasil bahwa tingkat kecepatan pengembalian modal kondisi sebelum Program PHT-Kopi Rakyat di desa contoh Malang dengan nilai R/C ratio 2,35 tanpa memperhitungkan komoditas tanaman sela dan 3,04 dengan telah memperhitungkan komoditas tanaman sela. Sementara itu sesudah pelaksanaan program PHT-Kopi Rakyat hanya memberikan tingkat R/C ratio 2,09 tanpa memperhitungkan komoditas tanaman sela dan 2,71 dengan telah memperhitungkan tanaman sela. Gambaran yang hampir sama juga terjadi di desa contoh Kediri, bahwa tingkat kecepatan pengembalian modal kondisi sebelum program PHT-Kopi Rakyat di desa contoh Kediri dengan nilai R/C ratio 1,85 tanpa memperhitungkan komoditas tanaman sela dan 2,84 dengan telah memperhitungkan komoditas tanaman sela. Sesudah pelaksanaan program PHT-Kopi Rakyat hanya memberikan tingkat R/C ratio 1,90 tanpa memperhitungkan komoditas tanaman sela dan 3,12 dengan memperhitungkan tanaman sela. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari efisiensi perputaran modal kinerja usahatani sebelum Program PHT-Kopi Rakyat lebih baik dibandingkan sesudah Program PHT-Kopi Rakyat.

Berdasarkan analisis biaya dan keuntungan usahatani menunjukkan bahwa usahatani kopi rakyat sebelum PHT memberikan beberapa gambaran sebagai berikut: (1) Besarnya biaya total usahatani kopi rakyat sebelum PHT sebesar Rp 3,31 juta/ha; (2) Besarnya penerimaan dari tanaman kopi sebesar Rp 7,78 juta; (3) Besarnya penerimaan dari tanaman sela sebesar Rp 2,28 juta/ha; (4) Pendapatan atas kopi saja memberikan pendapatan sebesar Rp 4,46 juta; dan (5) Pendapatan atas total penerimaan (kopi dan tanaman sela) sebesar Rp 6,74 juta/ha.

Berdasarkan analisis biaya dan keuntungan usahatani menunjukkan bahwa usahatani kopi rakyat sesudah PHT-kopi rakyat memberikan beberapa gambaran sebagai berikut: (1) Besarnya biaya total usahatani kopi rakyat sesudah PHT-kopi rakyat sebesar Rp 4,50 juta/ha; (2) Besarnya penerimaan dari tanaman kopi sebesar Rp 9,41 juta; (3) Besarnya penerimaan dari tanaman sela sebesar Rp 2,81 juta/ha; (4) Pendapatan atas kopi saja memberikan pendapatan sebesar Rp 4,91 juta; dan (5) Pendapatan atas total penerimaan (kopi dan tanaman sela) sebesar Rp. 7,72 juta/ha. Secara ringkas hasil analisi usahatani kopi rakyat sebelum dan sesudah PHT di desa contoh Malang dan Kediri dapat disimak pada tabel 4 dan Tabel 5 berikut.

Tabel 4. Analisis Biaya dan Penerimaan Usahatani Kopi Rakyat, Sebelum dan Sesudah PHT di Kabupaten **Malang**, Jawa Timur 2003

Uraian	Sebelum PHT (Rp/ha)	Sesudah PHT (Rp/ha)
I. Total biaya	3.310.533,52	4.496.896,70
II. Total penerimaan kopi	7.775.467,56	9.407.729,85
III. Produktivitas (kg/ha)	1.296,00	1.776,92
IV. Total Penerimaan	10.052.920,78	12.219.400,49
V. Pendapatan atas kopi	4.464.934,04	4.910.833,15
VI. Pendapatan total	6.742.387,26	7.722.503,79
VII. R/C ratio kopi	2,35	2,09
VIII. R/C ratio total	3,04	2,71

Tabel 4. Analisis Biaya dan Penerimaan Usahatani Kopi Rakyat, Sebelum dan Sesudah PHT di Kabupaten **Kediri**, Jawa Timur 2003

Uraian	Sebelum PHT (Rp/ha)	Sesudah PHT (Rp/ha)
I. Total biaya	3.626.151,04	4.730.469,06
II. Total penerimaan kopi	6.690.701,08	9.012.152,86
III. Produktivitas (kg/ha)	1.057,02	1.442,27
IV. Total Penerimaan	10.304.875,54	13.653.920,27
V. Pendapatan atas kopi	3.064.550,04	4.281.683,80
VI. Pendapatan total	6.678.724,50	8.923.451,21
VII. R/C ratio kopi	1,85	1,90
VIII. R/C ratio total	2,84	3,12

## **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS DESIMINASI DAN ADOPTSI TEKNOLOGI PHT KOPI RAKYAT**

Beberapa faktor teknis yang mempengaruhi petani dalam proses desiminasi dan adopsi teknologi PHT antara lain adalah: (1) Secara teknis teknologi PHT dapat diterapkan pada agroekosistem kebun kopi dataran tinggi, karena keseimbangan alamnya masih mendukung; (2) Teknologi budidaya kopi secara sehat yang merupakan prinsip dasar PHT, dapat menunjang pencapaian produktivitas hasil yang lebih baik; (3) Penerapan teknologi PHT dengan perbaikan teknik pemanenan dan penanganan pasca panen dapat meningkatkan

kualitas hasil; (4) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang identifikasi organisme pengganggu tanaman (OPT), musuh alami, serta mekanisme interaksi antara berbagai OPT dan musuh alami; dan (5) Dapat memperpanjang umur produktif tanaman kopi.

Beberapa faktor ekonomi yang mempengaruhi petani dalam proses desiminasi dan adopsi teknologi PHT antara lain adalah : (1) Penerapan teknologi PHT mengurangi biaya produksi, khususnya biaya pupuk dan pembelian obat-obatan kimia pemberantas hama dan penyakit tanaman kopi; (2) Meningkatkan pendapatan petani, baik melalui peningkatan produktivitas maupun perbaikan kualitas; (3) Meningkatkan stabilitas dan kontinuitas pendapatan, karena diversifikasi yang dilakukan petani sejalan dengan teknologi PHT, masa panen lebih panjang, umur produktif lebih lama, serta dijual secara bertahap.

Beberapa faktor ekologi-lingkungan yang dipandang mempengaruhi petani dalam proses desiminasi dan adopsi teknologi PHT antara lain adalah : (1) Penerapan teknologi PHT keseimbangan eko-sistem kebun kopi relatif tetap terjaga; (2) Keberadaan musuh alami dapat dipertahankan sehingga tidak musnah; (3) Pembuatan terasering dan rorak merupakan langkah konservasi lahan dan air dalam mempertahankan kesuburan kebun kopi.

Beberapa faktor sosial-kelembagaan yang dipandang mempengaruhi petani dalam proses desiminasi dan adopsi teknologi PHT antara lain adalah : (1) Meningkatkan dinamika dengan teknologi PHT sebagai entry pointnya; (2) Kegiatan gotong royong dan arisan tenaga kerja dapat digalakkan dalam mengatasi masalah keterbatasan TK di pedesaan; dan (3) Penggalangan modal kelompok tani menunjukkan kondisi yang membaik, baik untuk kelompok tani yang memperoleh bantuan modal dari UKM maupun yang tidak; serta (4) Adanya stimulan tumbuhnya kelembagaan ekonomi dalam bentuk koperasi kelompok tani yang ditujukan untuk dapat melakukan penganan pasca panen dan pemasaran hasil kopi.

Keberhasilan dalam proses transfer, difusi, dan adopsi teknologi ini dapat pula ditunjukkan dari prioritas komponen yang diterapkan dalam pengendalian hama, terlihat bahwa penggunaan pestisida tidak lagi merupakan komponen yang dijadikan prioritas dalam pengendalian hama. Di samping itu, juga ditunjukkan: (1) Penggunaan pupuk kimia sedikit menurun, namun ke arah pemupukan yang lebih berimbang serta penggunaan pupuk organik meningkat secara nyata dan meluas; (2) Pergeseran penggunaan pestisida kimiawi ke arah penggunaan pestisida nabati; dan (3) Penggunaan herbisida masih sulit ditekan, namun ada indikasi penggunaan herbisida ini menurun dengan penanganan secara manual dan mekanis, sehingga penggunaannya terbatas pada gulma yang sulit ditanggulangi seperti rumput alang-alang.

## **SIMPUL KRITIS DAN PILIHAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PHT KOPI RAKYAT DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH**

Kebijakan pengembangan PHT pada perkebunan kopi (rakyat) belum secara khusus terlihat terkait dengan kebijakan otonomi daerah. Dilihat dari segi waktu atau tahun pelaksanaannya, pelaksanaan pengembangan PHT secara formal memang bertepatan dengan pengesahan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, atau dikenal sebagai kebijakan otonomi daerah. (Biasanya ada tenggang waktu antara tahun disahkannya suatu Undang-undang dengan pelaksanaannya di lapangan). Waktu pelaksanaan program pengembangan PHT di lapangan adalah tahun 1999 dan baru efektif tahun 2000. Sementara itu, kebijakan otonomi daerah (dalam bentuk UU No. 22 Tahun 1999) tahun 1999, baru diimplementasikan di lapangan tahun 2000. Hingga tahun 2002, kebijakan otonomi belum memberikan dukungan positif bagi perkembangan pertanian di daerah, termasuk pengembangan agribisnis kopi rakyat yang dilatarbelakangi program pengembangan PHT.

Program PHT kopi rakyat adalah salah satu kebijakan Departemen Pertanian, c.q. Direktorat Jenderal Perkebunan, yang dijalankan mengikuti jalur birokrasi pemerintahan. Kebijakan pengembangan PHT yang terlihat di lapangan masih mengandung nuansa kebijakan pemerintah yang bersifat sentralistik. Sebelum dilaksanakan di lapangan (di tingkat petani), pengembangan program PHT-Kopi Rakyat memang melalui proses sosialisasi yang cukup baik. Namun demikian isi dari proses sosialisasi tersebut ditekankan pada penyiapan petani kopi untuk menerima program PHT yang materinya sudah dirancang di pusat. Dari sejak awal masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam kegiatan perencanaan atau perancangan pengembangan PHT sesuai dengan kondisi lokasi setempat.

Kinerja pelaksanaan program PHT pada pengembangan perkebunan kopi rakyat di pedesaan secara teknis menunjukkan gambaran yang positif. Walaupun di beberapa tempat belum terlihat dampaknya secara signifikan, namun di beberapa desa (di Kabupaten Malang) pelaksanaan program PHT kopi memberikan dampak positif terhadap kenaikan produktivitas kopi rakyat hingga 36 persen di Malang dan 37 persen di Kediri. Ini bisa terjadi karena *yield gap* antara kondisi awal pertanian kopi rakyat dan uji coba program PHT relatif besar. Pada kondisi demikian sistem perkebunan kopi rakyat masih sangat sensitif terhadap sentuhan teknologi produksi.

Sistem kelembagaan yang memungkinkan program PHT bisa menunjukkan keberhasilan di bidang peningkatan produktivitas kopi petani telah dibangun cukup bagus. Kekuatan pengembangan program PHT kopi terlihat pada rapinya keorganisasian dan pengontrolan jaringan kelembagaan PHT yang merentang dari tingkat pusat hingga daerah



(kabupaten). Selain itu, kelembagaan desiminasi program PHT di daerah belum banyak dicampuri oleh otoritas pemerintahan kabupaten, sehingga pelaksanaannya bisa terfokus pada rencana yang telah dirumuskan di pusat.

Walaupun saat ini pelaksanaan program PHT di lapangan tampak belum terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah, namun pada saatnya nanti keberhasilan dari program PHT ini (tidak terbatas hanya peningkatan produktivitas kopi petani) akan ditentukan juga oleh kualitas pelaksanaan otonomi daerah. Idealnya kebijakan otonomi daerah membuka peluang bagi pengembangan perekonomian daerah, termasuk yang digerakkan oleh perkebunan kopi rakyat di pedesaan, ke arah yang memiliki daya saing tinggi dan lebih berkelanjutan. Hanya saja, dalam jangka pendek peluang tersebut belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Penyebabnya antara lain:

1. Infrastruktur sosial-ekonomi-politik setempat belum mampu me-nyalurkan aspirasi masyarakat pedesaan, terutama petani kopi, secara efektif.
2. Kondisi agroekosistem wilayah pengembangan PHT tidaklah seragam; kecocokan program pengembangan PHT di suatu daerah (kecamatan atau desa) tidak selalu menggambarkan keberhasilan di daerah lain.
3. Tingkat pemahaman petani kopi peserta PHT terhadap rancangan program PHT masih belum sesuai dengan yang diidealkan, sehingga hasil akhir dari program pengembangan PHT dalam bentuk produk kopi yang berkualitas tinggi dan bernilai jual kompetitif belum terlihat bisa dirasakan petani kopi.
4. Konsep pengembangan PHT kopi yang diimplementasikan di lapangan masih mengutamakan peningkatan produksi bahan mentah kopi, dan belum secara khusus diarahkan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi yang relatif tinggi melalui kegiatan prosesing di pedesaan.
5. Luas garapan (yang relatif sempit, sekitar 0,3-0,5 ha per KK) dan kepemilikan lahan (banyak yang menyakap dan belum sebagai hak milik) usahatani masih menjadi kendala serius pengembangan perekonomian kopi di pedesaan.
6. Kompetisi pemanfaatan tenaga kerja keluarga akan menjadi kendala cukup besar, sebab kontribusi tenaga kerja dalam peningkatan produktivitas kopi petani meningkat relatif besar setelah mengikuti program PHT.
7. Industrialisasi kopi rakyat belum secara khusus dikembangkan dalam program PHT kopi, dan hal ini dikemudian hari bisa menjadi sumber disinsentif pengembangan agribisnis kopi setempat.

Paling tidak terdapat lima simpul kritis yang harus bisa dipecahkan untuk mendukung pengembangan kelembagaan PHT di masa datang, yaitu:

1. Sistem produksi (agribisnis) kopi rakyat yang tidak menghasilkan nilai tambah ekonomi yang wajar bagi pelaku ekonomi pedesaan, terutama bagi petani kopi.
2. Tataan ekonomi yang ada tidak kondusif bagi pengembangan agri-bisnis atau industrialisasi kopi di pedesaan, sehingga rangsangan untuk pemacuan inovasi di bidang kelembagaan teknologi, menjadi sulit diwujudkan.
3. Tataan politik yang bias elit politik dan pejabat pemerintah, hal ini belum memberikan kesempatan petani untuk berdaulat secara ekonomi, walaupun telah memasuki era otonomi.
4. Sistem manajemen dan keorganisasian agribisnis yang menyulitkan petani untuk mengembangkan semangat *entrepreneurship*-nya secara sehat.
5. Faktor pendukung lain yang masih lemah, misalnya kepemilikan asset agribisnis (oleh petani), lemahnya kepemimpinan lokal, pengelolaan infrastruktur publik yang masih lemah dan kondisi agroekosistem yang semakin degradatif.

Kebijakan pengembangan PHT kopi ke depan harus dilandaskan pada visi yang jernih, bawa *teknologi PHT untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan*. Visi ini harus menggantikan visi yang sudah usang, yaitu bahwa *teknologi PHT diciptakan sekedar untuk menunjukkan bahwa peneliti bisa menunjukkan kemampuannya dalam pengembangan teknologi*. Oleh sebab itu, pengembangan teknologi PHT ke depan harus memiliki implikasi langsung terhadap peningkatan daya saing perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

## **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN**

1. Berdasarkan evaluasi terhadap kebijakan PHT-Kopi Rakyat masih ditemukan beberapa permasalahan pokok, antara lain adalah: (1) Penentuan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) dalam kelompok tani calon peserta program masih belum menerapkan prinsip-prinsip selektifitas ; (2) Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah di tingkat kabupaten belum menyentuh pelaksanaan program PHT-Kopi Rakyat ; (3) Fluktuasi harga jual kopi yang tajam sangat mempengaruhi kinerja petani dalam menerapkan teknologi PHT Kopi; (4) Struktur pasar kopi yang dihadapi petani bersifat oligopsonistik, dengan pilihan dan

- tujuan pasar terbatas; (5) Belum adanya kelompok tani yang melakukan pendalaman produksi kopi dari ose kering menjadi produk jadi ; dan (6) Keterbatasan modal usaha baik untuk kegiatan usahatani, pengolahan, maupun dalam pemasaran secara bersama.
2. Tingkat partisipasi petani peserta program PHT-Kopi Rakyat pada berbagai tahapan kegiatan, dari tahap perencanaan, implementasi, hingga tahap monitoring dan implementasi menunjukkan tingkat partisipasi yang bervariasi. Tingkat partisipasi pada tahap perencanaan umumnya masih lemah, pada tahap pelaksanaan cukup baik, dan pada tahap monitoring dan evaluasi masih kurang.
  3. Persepsi terhadap kinerja aspek kepemimpinan kelembagaan PHT kopi rakyat di Malang dan Kediri, diamati berdasarkan beberapa unsur yang mencakup kecerdasan, visi, keteladanan, rasionalitas, komunikatif dan demokratis adalah bagus. Petani responden juga mempersepsikan kinerja kompetensi SDM pelaksana PHT di lapangan dengan sangat positif dan menilai kompetensi SDM pelaksana sudah memadai. Petani juga memberi persepsi yang khusus terhadap diri mereka sebagai peserta program, yang menunjukkan bahwa sebagian besar petani jika dilihat dari ketrampilan bertani, pengalaman bertani, kematangan emosional, kegigihan bekerja maupun apresiatif terhadap tatanilai maupun organisasi sudah merupakan kondisi awal yang baik.
  4. Tingkat partisipasi petani peserta Program PHT-Kopi Rakyat di dalam perencanaan kegiatan di desa contoh Kabupaten Malang dan Kediri belum dilakukan secara partisipatif, sementara dari aspek implementasi, program PHT-Kopi Rakyat telah dilakukan secara cukup partisipatif dengan melibatkan petani peserta mulai tahap implementasi hampir pada semua aspek kegiatan. Aspek-aspek yang dirasa kurang oleh petani adalah aspek penanganan pasca panen, pengolahan, dan aspek pemasaran.
  5. Berdasarkan analisis terhadap beberapa parameter usahatani seperti tingkat produktivitas dan pendapatan usahatani menunjukkan bahwa meskipun dengan adanya program PHT telah meningkatkan produktivitas, pendapatan usahatani, serta R/C ratio. Produktivitas meningkat antara 36-37 persen, dan pendapatan meningkat antara 14,54 – 33,61 persen.
  6. Beberapa faktor teknis yang mempengaruhi petani dalam adopsi teknologi PHT antara lain adalah: (1) Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang teknologi PHT, teknologi budidaya kopi secara sehat, dan teknik pemanenan dan penanganan pasca panen yang baik; (2) Meningkatkan pengetahuan tentang identifikasi organisme pengganggu tanaman; (3) Meningkatkan pengetahuan tentang iden-tifikasi berbagai musuh alami; (4) Mengetahui mekanisme interaksi antara berbagai OPT dan musuh alami; (5) Dapat memperpanjang umur produktif tanaman kopi; dan (6) Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil kopi.

7. Beberapa faktor ekonomi yang mengandung makna bahwa aplikasi teknologi PHT memberikan pengaruh positif, antara lain adalah: (1) Mengurangi biaya produksi, khususnya biaya pupuk dan pembelian obat-obatan kimia pemberantas hama dan penyakit tanaman kopi, meskipun secara keseluruhan aplikasi teknologi PHT meningkatkan biaya produksi terutama dalam penggunaan tenaga kerja; (2) Meningkatkan pendapatan petani, baik melalui peningkatan produktivitas maupun perbaikan kualitas; (3) Meningkatkan stabilitas dan kontinuitas pendapatan, karena masa panen lebih panjang, umur produktif lebih lama, serta dijual secara bertahap.
8. Beberapa faktor ekologi-lingkungan yang dipandang memberikan manfaat dari aspek ini, antara lain adalah: (1) Keseimbangan eko-sistem kebun kopi relatif tetap terjaga; (2) Keberadaan musuh alami dapat dipertahankan sehingga tidak musnah; (3) Pembuatan terasering dan rorak merupakan langkah konservasi lahan dan air dalam mempertahankan kesuburan kebun kopi.
9. Beberapa faktor sosial-kelembagaan yang dipandang memberikan manfaat dari aspek ini, antara lain adalah: (1) Dinamika, kekompakan, dan kebersamaan kelompok tani dapat ditingkatkan dengan teknologi PHT sebagai entry pointnya; (2) Kegiatan gotong royong dan arisan tenaga kerja dapat digalakkan dalam mengatasi masalah keterbatasan TK di pedesaan, sehingga meningkatkan aktivitas ekonomi kebun kopi yang sekaligus mengatasi masalah permodalan petani; dan (3) Penggalangan modal kelompok tani menunjukkan kondisi yang membaik, baik untuk kelompok tani yang memperoleh bantuan modal dari UKM maupun yang tidak.
10. Keberhasilan dalam proses transfer, difusi, dan adopsi teknologi ini dapat pula ditunjukkan dari prioritas komponen yang diterapkan dalam pengendalian hama, antara lain: (1) Penggunaan pestisida tidak lagi merupakan komponen yang dijadikan prioritas dalam pengendalian hama; (2) Penggunaan pupuk kimia sedikit menurun, namun ke arah pemupukan yang lebih berimbang serta penggunaan pupuk organik meningkat secara nyata dan meluas; (3) Pergeseran penggunaan pestisida kimiawi ke arah penggunaan pestisida nabati; dan (4) Penggunaan herbisida masih sulit ditekan, namun ada indikasi penggunaan herbisida ini menurun dengan penanganan secara manual dan mekanis, sehingga penggunaannya terbatas pada gulma yang sulit ditanggulangi seperti rumput alang-alang.
11. Kebijakan pengembangan PHT pada perkebunan kopi (rakyat) belum secara khusus terlihat terkait dengan kebijakan otonomi daerah. Paling tidak terdapat lima simpul kritis untuk mendukung pengembangan kelembagaan PHT di masa datang, yaitu: (1) Sistem produksi (agribisnis) kopi rakyat yang tidak menghasilkan nilai tambah ekonomi yang

wajar bagi pelaku ekonomi bagi petani kopi; (2) Tatanan ekonomi yang tidak kondusif bagi pengembangan agribisnis atau industrialisasi kopi, sehingga kurang merangsang untuk pemacuan inovasi di bidang kelembagaan teknologi; (3) Tatanan politik dalam era otda yang belum merepresentasikan masyarakat petani; (4) Masih rendahnya jiwa *entrepreneurship* petani; (5) Faktor pendukung yang masih lemah, kepemilikan asset, lemahnya kepemimpinan lokal, rendahnya kualitas infrastruktur publik, dan kondisi agroekosistem yang semakin degradatif.

12. Kebijakan pengembangan PHT kopi ke depan harus dilandaskan pada visi yang jernih, bawa *teknologi PHT untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan*. Visi ini harus menggantikan visi yang sudah usang, yaitu bahwa *teknologi PHT diciptakan sekedar untuk menunjukkan bahwa peneliti bisa menunjukkan kemampuannya dalam pengembangan teknologi*. Oleh sebab itu, pengembangan teknologi PHT ke depan harus memiliki implikasi langsung terhadap peningkatan daya saing perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous. 2003. Pengembangan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Kopi di Jawa Timur. Bagian Proyek IPM-SEC Jawa Timur. Mojoagung.
- BPS. 1996-2001. Statistik Ekspor. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Breminer, I. 2003. Kemauan Bersma; Solusi Krisis Kopi. Kopi Indonesia: Jendela Informasi Perkopian, 114(X): 26-27, Mei – Juni 2003. Jakarta.
- Creswell, John W. 1994. Research Design : Qualitative and Quantitative Aproach. Sage Publication.
- Darmawan, D. H. A. dan B. Dradjat. 1995. Globalisasi Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Agribisnis. Pelatihan Metoda Penelitian dan Pengembangan Pertanian Dengan Pendekatan Agribisnis. Kerjasama antara Balai Latihan Pegawai Pertanian Cihea dengan Proyek Pembinaan Kelembagaan Penelitian Pertanian Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.
- Darmawan, D.A dkk. 1993. Kajian Aspek sosial Ekonomi Pengendalian Hama Terpadu. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Davis, J. and R. Goldberg. 1957. A Concept of Agribusiness. Harvard University, Boston.
- Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur. 1997-2001. Laporan Tahunan. Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur.
- Downey, W. D. and S. P. Erickson. 1987. Agribusiness Management. McGraw-Hill, New York.
- Dumont, R. 1971. Agricultural as Man's Transformation of The Rural Environment. *In* Peasant Sicieties (Edited by T. Shanin). Penguin Book Inc. Midlesex.

- Hutabarat, B., R. Hendayana, B. Winarso dan B. Santoso. 1993. Keunggulan kompetitif Komoditas Ekspor : Kasus Kopi di Jawa Timur dan Babi di Sumatera Utara. Monograph Series No. 11. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Inayatullah. 1979. Conceptual Framework for Country Studies of Rural Development. *In* Approach to Rural Development: Some Asian Experiences (Edited by Inayatullah). Asian and Pasifics Development Administration Center. Kualalumpur.
- Kartono, Gatot. 2003. Keragaan dan Strategi Penerapan PHT (Pengelolaan Hama Terpadu) di Tingkat Petani. Orasi Pengukuhan Ahli Peneliti Utama. Balai Penelitian dan Pengkajian Pertanian Jawa Timur. Bogor.
- Kasryno, F. 1999. Pemanfaatan Sumberdaya Pertanian dan Pengembangan Sistem Usaha Pertanian Menuju Era Globalisasi Ekonomi. Dalam Dinamika Inovasi Sosial Ekonomi dan Kelembagaan Pertanian (penyunting I W. Rusastra, dkk). Buku I. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- MacIver, R.M. and C.H. Page. 1962. Society: An Introduction Analysis. McMillan and Co.Ltd. London.
- Poension, J.A. 1969. The Analysis of Social Change Reconsidered: A Sociological Study. The Hague. Paris.
- Pranadji, T. 2002. Otonomi Daerah dan Daya Saing Agribisnis: Pelajaran dari Propinsi Lampung. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, 1(2): 152-166, Juni 2003. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Pranadji, T. 2003. Reformasi Kelembagaan Dalam Kemandirian Perekonomian Pedesaan: Kajian pada Kasus Perekonomian Padi Sawah. Makalah Seminar Nasional "Ekonomi Padi dan Beras Indonesia". 13 Nopember 2003. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta.
- Salim, E. 1991. Pembangunan Berkelanjutan: Strategi Alternatif Dalam Pembangunan Dekade Sembilan Puluhan. Prisma No. 1 Januari 1991.
- Santoso, B., 1987 a. Analisis Efisiensi Ekonomi Relatif Serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Keuntungan Pada Usahatani Kopi Rakyat: Studi Pada Beberapa Desa di Lampung. Tesis Magister Sains, Fakultas Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Santoso, Budi dan Chairil A. Rasahan. 1989. Analisis Efisiensi Ekonomi Relatif Usahatani Kopi Rakyat di Lampung. Jurnal Agro Ekonomi 8 (1 Mei): 50-61. Pusat Peneltian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Saragih, B. 1997. Pembangunan Sektor Agibisnis Dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Indonesia. Suatu Sumbangan Pemikiran Untuk Repelita VII Pada Temu Wicara Persiapan Repelita VII. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bekerjasama dengan Pusat Studi Pembangunan, Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor. Jakarta.
- Sasmita, G., 1996. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. CIDES.
- Shanin, T. 1971. Peasant and Peasant Societies. Penguin Book Inc. Middlesex.
- Simatupang, P. 1998. Koordinasi Vertikal Sebagai Strategi Untuk Meningkatkan Daya saing dan Pendapatan Dalam Era Globalisasi Ekonomi (Kasus Agribisnis Kopi). Laporan Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.

- Sudaryanto, T. dan E. Pasandaran. 1993. Agribisnis Dalam Perspektif: Konsepsi, Cakupan Analisis, dan Rangkuman Hasil Pembahasan. Persepektif Pengembangan Agribisnis di Indonesia. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.
- U.U. No. 22 Tahun 1999. Undang-Undang Pemerintah Daerah. Penerbit. Pariba.
- U.U. No. 25 Tahun 1999. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penerbit. Pariba.
- Untung, Kasumbogo. 2002. Strategi Implementasi PHT Dalam Pengembangan Perkebunan Rakyat Berbasis Agribisnis. Panduan Simposium Nasional Penelitian PHT Perkebunan Rakyat. Bagian Proyek PHT Tanaman Perkebunan. Bogor.
- Yusdja, Y., Ch. Saleh, M. Amir, M. Arifin, dan Al Sri Bagyo. Studi Baseline Aspek Sosial Ekonomi Pengendalian Hama Terpadu. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Bogor.